

BENTURAN BUDAYA DAN KONFLIK SOSIAL *)

Dr. Payung Bangun)**

Sejarah kehidupan bangsa Indonesia sebagai satu bangsa negara menunjukkan seringnya terjadi konflik internal. Sedah sejak 1948, malah sebelumnya, yaitu 1946, konflik ikut mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik internal sudah berulang kali terjadi hingga waktu belakangan ini, malah sejumlah konflik masih berlangsung terus sampai sekarang.

Meskipun adanya konflik dalam kehidupan bersama boleh dikatakan sebagai suatu yang biasa, namun konflik yang dapat membahayakan atau mengancam keutuhan kehidupan bersama tidak dapat diabaikan dan dibiarkan begitu saja.

Konflik yang terjadi dalam kehidupan Bangsa Indonesia sebagaimana yang terlihat pada waktu belakangan ini di sejumlah daerah dapat digolongkan sebagai konflik yang mempunyai potensi mengancam dan membahayakan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Demikian halnya dengan yang terjadi di Jakarta (1958), di Ambon dan Maluku, di Kalimantan Barat, di Aceh, di Kalimantan Tengah dan sejumlah kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Terjadinya konflik-konflik seperti itu menjadi latar belakang atas alasan yang cukup kuat untuk mengemukakan dalam forum seperti seminar sekarang ini. Terlebih lagi selain konflik yang sudah terbuka di sejumlah daerah terdapat potensi konflik yang bila dibiarkan dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Sekarang ini memang mmasih merupakan sebagai gejala yang berindikasi ptensial yang bersumber pada *latent interest* yang pada waktu-waktu tertentu muncul ke permukaan sebagai gerakan massa. Demikian misalnya dengan gerakan Rakyat Penunggu yang menuntut dikembalikan dan dipastikannya hak jaluran di Sumatera Timur.

Baik konflik yang telah terjadi secara terbuka ataupun yang masih merupakan potensi menjadi terbuka harus segera dan mendesak dicarikan pemecahan untuk mencapai penyelesaiannya. Dalam upaya mencarinya tentunya tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui penyebab atau yang melatar belakanginya.

Makalah ini bermaksud mencoba memperbincangkan konflik sebagai produk dari terjadinya benturan budaya. Fokus perhatian diletakkan pada kajian tersebut

dilandasi pemikiran dan pendapat bahwa kebudayaan sebagai sumber nilai dan norma menentukan sikap dan tindakan. Artinya, konflik terjadi oleh karena adanya perbedaan budaya dari sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal di suatu tempat yang sama dan berhubungan serta kontak antar budaya tidak terjadi dengan baik.

BERBAGAI WUJUD KONFLIK SOSIAL

1. Revolusi Sosial

Pada awal kemerdekaan di bagian Utara Sumatera terjadi gerakan massa berdarah yang dikenal dengan sebuta Revolusi Sosial. Gerakan tersebut terutama bertujuan menghapuskan struktur pemerintahan dan kekuasaan para penguasa tradisional, seperti Rajka-Raja dan Sultan-Sultan. Gerakan yang bersuasana anti feodalisme tersebut dalam upayanya tidak hanya mengankap atau menawan siapa yang mereka curigai, tetapi juga melakukan pembunuhan, sebagaimana yang dialami oleh beberapa orang Raja Simalungun, keluarga Kesultanan Langkat, Kesultanan Panel, dan Bilah, para bangsawan Aceh dan lain-lain.

Proses penghapusan kekuasaan kaum feodal di awal kemerdekaan itu memang terjadi hampir di seluruh daerah itu. Terutama di daerah-daerah yang suksesi kekuasaannya berazaskan turun-temurun. Proses tersebut merupakan realisasi dari demokratisasi kehidupan sesuai engan berdirinya sebuah negara yang berbentuk republik dan menganut demokrasi. Salah satu perwujudan denokrasi adalh menghapus semua struktur lama dan menggantinya dnegan yang baru. Begitu pula dengan pemegang kekuasaan detrnentukan dengan berdsarkan pemilihan dan dengan tegas tidak diperbolehkan seseorang yang berasal dari keturunan penguasa sebelumnya menjadi calon.

Proses demokratisasi yang kemudian berkembang menjadi revolusi berdarah berkaitan pula dengan pemimpin radikal berpengaruh besar dalam pembentukkan kekuasaan Republik. Pemimpin radikal yang sejak Pergerakan Kebangsaan mempunyai pandangan dan sikap anti feodal menghendaki penghapusan sisa-sisa kekuasaan Jawa dnegan segera. Kehendak seperti itu dapat dipahami dengan adanya pembentukkan sebuah panitia untuk menerima kembalinya kekuasaan Belanda yang diprakarsai oleh para Sultan.

2. Horizontal

Konflik sosial yang terjadi dalam dua atau tiga tahun belakangan ini berbeda dengan konflik-konflik yang ada sebelumnya dilihat dari pihak yang terlibat maupun korbannya. Seperti diketahui konflik belakangan ini terjadi antara suku bangsa, antar agama, antar golongan, dan antar ras yang dalam akronim yang populer disebut SARA. Konflik yang terjadi di Jakarta (1958) mengandung nuansa ras, sejumlah kerusuhan yang terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lombok (Mataram) bernuansa agama, kerusuhan di Kalimantan Barat (Singkawang dan Sambas) dan Kalimantan Tengah berbau etnik, kerusuhan Ambon dan Maluku campuran etnik dan agama. Demikian sejumlah kerusuhan perwujudan konflik sosial sebagai contoh.

3. Konflik Aceh

Dua konflik yang sampai sekarang ini masih terus belum terselesaikan adalah yang terjadi di daerah Aceh dan Irian Jaya. Kedua konflik tersebut menurut hemat saya mengandung suasana politik yang didalamnya terkesan ada faktor etnik, dengan demikian merupakan konflik vertikal, yaitu antara daerah dan pusat, yang kalau diurut pada bagian bawahnya terdapat faktor etnik.

Faktor etnik dapat diurut ke beberapa tahun sebelum keadaan seperti yang sekarang bermula. Sepanjang yang dapat saya ketahui di tahun 1960-an pernah menjadi konflik antar etnik di Sinabang di pulau Simeulu. Pada waktu itu terjadi eksodus penduduk pulau tersebut yang berasal dari Tapanuli. Kemudian faktor etnik yang melahirkan kecemburuan sosial terjadi di daerah pertambangan di Aceh Timur yang timbul karena masyarakat setempat merasa “dikucilkan “ dalam penerimaan tenaga kerja atau karyawan untuk proyek-proyek besar di daerahnya. Selain daripada kedua contoh diatas eksodusnya para transmigran dari beberapa lokasi di Aceh dapat dilihat sebagai dampak dari ketidakserasian etnik.

4. Konflik Irian Jaya

Apa yang terjadi di Aceh, meskipun banyak perbedaannya ditemukan pula di Irian Jaya. Masuknya modal besar-besaran melalui pembangunan proyek-proyek raksasa, seperti Freeport, menimbulkan goncangan-goncangan dalam kehidupan

masyarakat. Loncatan besar yang dimasukkan melalui perusahaan besar tidak dapat diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Kehidupan yang dapat digolongkan dalam zaman batu diloncatkan langsung ke zaman pasca industri.

5. Konflik Tanah Jaluran

Berbeda dengan empat wujud konflik yang telah dikemukakan, wujud konflik kelima ini tidak ayau belum merupakan konflik terbuka secara horizontal, meskipun mempunyai potensi untuk itu. Konflik tersebut sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun., tetapi terbatas merupakan “letupan-letupan” melalui gerakan massa yang relatif kecil. Namun melihat berulang-berulang terjadi dan sampai sekarang belum ada pemecahan yang benar-benar merupakan solusi, maka konflik ini tidak dapat diabaikan atau diremehkan. Terlebih lagi pada waktu belakangan ini gerakan tentang tanah jaluran tersebut sudah semakin kuat dan suaranya semakin keras.

Konflik Tanah Jaluran muncul dari masalah tanah garapan bagi Rakyat Perunggu di Sumatera Timur, khususnya di daerah-daerah bekas Kesultanan. Tradisi Tanah Jaluran dan Rakyat Perunggu mulai sejak dan dan sebagai konsekuensi dari pembukaan dan perluasan perkebunan di daerah itu sejak akhir abad-19. Isu tersebut paling menonjol di daerah Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang dan terutama mengenai etnik Melayu.

Masalah Tanah Jaluran dan Rakyat Penunggu muncul bersamaan dengan sejumlah perkebunan melepaskan areal konsesinya dan menjadi migrasi spontan dari daerah sekelilingnya. Terutama dari daerah dataran tinggi dan Tapanuli. Para migran spontan itu merupakan pekerja-pekerja keras dan gesit. Sedemikian rupa “semangat juang hidup” mereka, sehingga seakan-akan mereka “haus tanah”, mereka mencari dan mnegmbil tanah-tanah yang tersedia yang dilepaskan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Tanah-tanah tersebut dianggap “tidak bertuan”.

Sementara pada pihak lain Rakyat Penunggu semakin sulit memperoleh tanah garapan. Tradisi Tanah Jaluran yang sebelum kemerdekaan terjamin pengadaannya sekarang tidak demikian lagi. Para Sultan sebagai penjamin dan pengatur tidak mempunyai kekuasaan dan wewenang lagi. Peraturan yang berlaku bukan lagi peraturan Kesultanan, tetapi Undang-Undang Indonesia.

PERBENTURAN BUDAYA

Demikian lama wujud onflik yang dikemukakan dalam makalah ini. Kelima wujud tersebut dimaksudkan sebagai sampel dari sekian banyak konflik besar dan kecil yang pernah terjadi dalam kehidupan bangsa kita.

Kalau wujud konflik tersebut dianalisa adakan terlihat hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Revolusi Sosial berhadapan setidaknya dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Aristokratik sebgaimana yang berkembang dan dikembangkan dari istana dan kebudayaan Demokratik yang tyersebar dan berkembang bersama kemerdekaan. Kebudayaan Aristokratik mengenal dankental dengan filsafat dari hirarki sosial yang membedakan manusia berdasarkan kelahiran, kebudayaan demokratik mengajarkan persamaan.

Muncul dan diterimanya kebudayaan demokratik menjadi dorongan untuk menghapuskan segala sesuatu yang berhubungan atau yang berbau kebudayaan Aristokratik. Penghapusannya meliputi penghapusan pendukungnya. Lambang-lambang dan semua yang dapat mengingatkan orang kepada kebudayaan itu. Demikianlah terjadi penangkapan, pembunuhan, perampasan harta kekayaan dan lain-lain. Puncak konflik terjadi pada malam 3 Maret 1946 ketika terjadi penculikan dan pembunuhan atas sejumlah raja dan sultan. Namun semangat atau kebudayaan anti Aristokratik terus hidup sepanjang perjuangan kemerdekaan.

Revolusi sosial yang berdarah terjadi di sejumlah daerah yang di bawah kekuasaan Sultan dan Raja, yaitu Kesultanan- Kesultanan Langka, Deli Serdang, Asahan. Bila Panel dan para Raja di Simalungun. Di daerah ini, seperti di Tapanuli dan Tanah Karo tidak terjadi. Kenyataan seperti itu menimbulkan dgaan atau hipotesis bahwaRevolusi Berdarah terjadi di daera-daerah dimana “jurang” perebedaan kebdayaan stn dan kebudayaan rakyat besar, sedangkan di daerah-daerah yang “jurangnya” kecil tidak terjadi. Di daerah-daerah Kesultanan dan Kerajaan-Kerajaan Simalungun sudah berkembang dua strata kebudayaan yang dapat di sebut kebudayaan istana dan kebudayaan rakyat. Di Tapanuli dan Tanah Karo strata seperti itu tidak ada. Kebudayaan yang berkembang di kedua daerah itu adalah kebudayaan rakyat. Dengan demikian “kedekatan” penguasa dan rakyatnya cukup kuat mengurangi tumbuhnya sentiment yang radikal anti penguasa tradisionL.

2. Konflik social kelompok kedua yang belakangan ini lebih populer dengan sebutan konflik horizontal menunjukkan konflik bernuansa keagamaan dan etnik. Nuansa-nuansa tersebut dengan jelas menunjukkan terjadinya disharmoni social oleh karena perbedaan prorientasi budaya yang disebabkan oleh perbedaan sumber strata yaitu agama dan etnik. Meskipun ada bantahan tetapi kerusuhan Jakarta 1998 nyata sekali memperlihatkan factor perbedaan etnik dan ras, sejumlah kerusuhan di Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan factor agama, kerusuhan Kalimantan, Barat dan Kalimantan Tengah faktor etnik dan kerusuhan Ambon dan Maluku mencakup factor etnik dan agama.

Konflik yang mempunyai perbedaan etnik sebagai factor penyebab yang membedakan penduduk asli atau masyarakat setempat dan masyarakat pendatang tentunya mempunyai kebudayaan yang berbeda. Perbedaan tersebut rupanya melahirkan suatu kondisi yang tidak cukup mendukung bagi berlangsungnya pergaulan yang harmonis, tetapi terjadinya hidup berkelompok yang antara satu dengan yang lain merupakan “orang asing”.

Demikian pula konflik yang bernuansa keagamaan. Manipulasi perbedaan dan ekstriminitas yang dalam beberapa peristiwa diperkuat dengan isu etnik dan ras. Sudah barang tentu sejumlah nilai yang berbeda yang bersumber pada ajaran agama jika dimanipulasi dan diekstrimkan dapat menimbulkan radikalisme. Radikalisme yang tidak dapat dikendalikan lagi akan melahirkan tindakan-tindakan radikal yang wujud nyatanya sulit diperkirakan.

3. Konflik Aceh yang sampai sekarang masih bertlanjut kelihatannya lebih merupakan konflik yang bersumber pada masalah ekonomi dan politik, yaitu ketidakserasian aspirasi rakyat Aceh dengan apa yang diperolehnya selama ini. Setidaknya terkesan demikian melihat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Namun konflik Aceh sudah berulang kali terjadi, pada tahun 1983 terjadi konflik dalam bentuk pemberontakan itu dapat dikatakan sebagai pemberontakan yang memanfaatkan sentiment agama. Tetapi kalau dilihat lebih mendalam sentimen agama adalah sebagian kecil oleh karena sentimen tersebut kelihatannya terbatas pada “pembangkit” semangat untuk ikut serta ambil bagian.

Sebuah memorandum yang direlis Komando Militer Tentara dan Teritorium I Bukit Barisan yang diterbitkan khusus menanggapi pecahnya pemberontakan itu antara lain berpendapat bahwa akar permasalahan sebenarnya “tersinggungannya” harga diri dan rasa bangga social (social proudnes) dari rakyat Aceh. Dua tindakan Republik yang disebutkan, yaitu pembubaran divisi X TNI dan meleburnya kedalam Komando Tentara dan Teritorium Sumatera Utara bersama-sama dengan Sub-Teritorium VII Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan dan Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur. Peleburan seperti itu bagi pemimpin dan rakyat Aceh sebagai suatu pelecehan, karena dari mempunyai divisi sendiri “turun” menjadi hanya mempunyai resimen sendiri.

Hal kedua adalah peleburan Propinsi Aceh kedalam Propinsi Sumatera Utara, sehingga Aceh hanyalah menjadi salah satu dari tiga keresidenan di dalam propinsi tersebut. Berkaitan dengan peleburan tersebut seorang tokoh ulama kharismatik Tengku Daud Beureueh yang sebelum peleburan adalah Gubernur Militer untuk Aceh. Tanah Karo dan Langkat begitu saja dicopot jabatannya dan dikatakan akan dipindahkan ke Kementrian Dalam Negeri tanpa kepastian kedudukannya sebagai apa.

Kedu persoalan tersebut pernah dikemukakan oleh Maludin Simbolon sebagai Panglima kepada Hardi sewaktu kerusuhan masyarakat Aceh mulai memanas. Namun tidak mendapat tanggapan yang cukup, sehingga pemberontakan kemudian pecah.

4. Konflik di Irian Jaya, khususnya yang terjadi di sekitar pertambangan rakss di Timika, mungkin dapat dijadikan sample perbenturan “budaya industrial” dan “budaya rakyat”. “Budaya rakyat” yang sangat bersahaja, penuh dengan hubungan-hubungan emosional baik dengan sesame maupun dengan lingkungan dan cirri-ciri kebudayaan sederhana lainnya diperhadapkan dengan “budaya industrial” yang begitu rasional. Berorientasi terutam pada profit dan produksi sebesar-besarnya, hubungan sesama yang impersonal yang lebih berlandaskan hubungan fungsional.

Pertemuan dua kebudayaan yang berbeda seperti itu sebenarnya tidaklah menjadi persoalan selama tidak terjadi pelanggaran “wilayah” budaya yang menyatakan dirinya tidak hanya dalam wujud gagasan dan perilaku, tetapi juga dalam benda, harta kekayaan atau sumber hidup. Dan pelanggaran itulah yang terjadi di Irian Jaya. “Budaya rakyat” mempunyai tradisi sendiri yang di warisi serta tetap menjadi

pegangan tunggal masyarakat. “Budaya industrial” memasukkan tradisi baru yang tidak dimengerti malah bertentangan dengan tradisi rakyat.

5. Sample kelima berkenaan dengan “dihilangkannya’ sebuah tradisi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Melayu petani. Tradisi Tanah Jaluran menjamin tersedianya lahan pertanian yang dapat dipergunakan sebagai sumber kehidupan petani Melayu yang dikenal dengan sebutan Rakyat Penunggu. Tradisi itu kemudian “hilang” bersamaan dengan terjadinya penggarapan lahan-lahan yang dilepaskan oleh perkebunan oleh masyarakat non-etnik Melayu sebagaimana yang terjadi secara besar-besaran sejak wla 1950-an.

Persoalan Tanah Jaluran cukup lama seperti terpendam karena faktor peraturan peretanaan (agraria) dan orang Melayu adalah senioritas dibandingkan dengan yang non-Melayu. Meskipun sesekali muncul juga ke permukaan dengan nada yang sangat lemah. Namun belakangan ini bersamaan dan senada dengan lahirnya orde Reformasi suara yang menuntut kepastian hukum tentang Tanah Jaluran bagi rakyat Penunggu sudah cukup keras.

PERBENTURAN BUDAYA SEBAGAI FAKTOR KONFLIK

Perbenturan budaya tidak menimbulkan konflik sosial dengan segera. Perbenturan budaya dapat menimbulkan konflik bila perbenturan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus atau terjadi akumulasi benturan. Konflik sosial yang pernah terjadi dan dialami masyarakat Indonesia timbul dari terjadinya akumulasi benturan budaya.

Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang menjadi sumber terjadinya benturan budaya yang kemudian menimbulkan konflik sosial itu.

1. Alienasi Vertikal

Bahwa masyarakat mengenal perbedaan tingkat sosial kiranya tidak memerlukan pembuktian lagi. Namun masuknya pengaruh luar dapat memperbesar kesenjangan antar tingkat sosial. Demikian, misalnya sebagaimana yang terjadi di Kesultanan Melayu dan Kerajaan Simalungun.

Proses alienasi itu terjadi sebagai konsekuensi sosial dari politik agraria dan perubahan konsesi pertanian menjadi sewa jangka panjang yang dirumuskan oleh

Pemerintahan Hindia Belanda dan diterima oleh para Sultan dan juga oleh Raja Simalungun.

Permasalahan yang berawal pada upaya perkebunan untuk memperoleh lahan yang cukup, terjamin dan murah yang dapat berhasil karena menguntungkan bagi para Sultan dan Raja menyebabkan rakyat menanggapi Sultan dan Rajanya sebagai “orang lain”, yaitu “peranjangan” kekuasaan asing. Pada waktu kemerdekaan sudah kembali dan berdirinya Negara nasional telah terjadinya alienasi menyebabkan dua pihak saling berhadapan dan terjadilah Revolusi Sosial.

2. Politik Kebudayaan Nasional dan Dampaknya

Pertanyaan mengenai arti Kebudayaan Nasional sulit menjawabnya. Setidaknya ada dua macam jawaban tentang itu. Pertama, pendapat yang mengatakan kebudayaan Nasional itu tidak ada setidaknya belum ada. Apa yang ada sekarang adalah kebudayaan-kebudayaan daerah atau kebudayaan suku bangsa. Pendapat kedua mengatakan ada, yaitu kebudayaan yang menjadi absensi atau rujukan dalam hidup sebagai bangsa. Kebudayaan nasional itu merupakan “puncak-puncak dari kebudayaan daerah” sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Secara konkrit pendapat kedua menunjuk pada semua yang berfungsi sebagai orientasi atau rujukan dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Kongres Kebudayaan 1991 bermaksud menuntaskan pengertian Kebudayaan Nasional tersebut yang kelihatannya berupaya mencari “puncak-puncak” yang akan dijadikan “ramuan”. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pembahasan mengenai kebudayaan daerah yang dibawakan oleh peserta dari daerah. Sayangnya, seperti biasanya sebuah seminar, kongres kelihatannya ‘menghasilkan’ sesuatu untuk dirinya sendiri. Gaungnya tidak meluas.

Politik Kebudayaan Nasional tidak hanya menyatakan dirinya dalam Kongres Kebudayaan tahun 1991, tetapi secara tidak langsung, namun sangat berpengaruh, “disebarluaskan” dan diwujudkan melalui penataran ideology, yaitu penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Meskipun penataran itu tujuan pokoknya menyebarluaskan pengertian dan fungsi Pancasila sebagaimana yang diartikan pada waktu itu secara implicit terdapat pula politik kebudayaan. Bukanlah penataran itu bertujuan membentuk warga Negara sebagaimana yang didefinisikan

sesuai dengan kepentingan dan keperluan pada waktu itu termasuk sikap. Pandangan dan perilaku atau tindakannya dalam rangka mencapai tujuan tersebut terdapat kecenderungan untuk mempertipis keragaman dan menggantikannya dengan keseragaman. Berbeda itu tidak baik dan yang baik adalah sama. Pancasila menurut isi P-4 menjadi sumber dari semua nilai dan aturan (norma) dan ditempatkan pada kedudukan tolak ukur tunggal bagi nilai dan norma yang berlaku dan boleh dipedomi, sebagai arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedemikian rupa mutlaknya fungsi Pancasila direkayasa sebagai tolak ukur tunggal. Sebagai satu-satunya *paramount values*, sehingga pemilahan menghasilkan dikotomi Pancasila dan Non-Pancasila atau anti Pancasila.

Politik kebudayaan versi P-4 tersebut disebar operasionalisasinya di dalam dan melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kelihatannya sangat demokratis dan adil serta menghormati hak asasi untuk tumbuh, tetapi sangat kental dengan nuansa *free fight liberalism* yang akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi yang kuat dan pengerdilan sampai kematian bagi yang lemah. Penerapan “kunci pokok” serasi, seimbang dan selaras sebagai justifikasi dari pembenaran yang besar dan kuat dan kewajiban yang kecil dan lemah untuk menyesuaikan diri.

Dikotomi besar-kecil, kuat-lemah dari kebudayaan tersebut tidak hanya dalam wilayah nasional, tetapi dapat pula ditemukan dalam budaya-budaya di tingkat setempat atau local. Dominasi budaya lokal yang kuat atas yang lemah terjadi di mana-mana. Faktor demografi menopang dominasi dalam budaya kebudayaan tersebut.

Politik kebudayaan sebagaimana yang diuraikan mempunyai dampak terhadap kehidupan nasional dan kehidupan masyarakat setempat (local). Dampak pertamanya adalah terjadinya semacam perlombaan antar budaya-budaya daerah. Hasilnya adalah kepincangan pertumbuhan budaya. Di satu pihak terdapat budaya-budaya yang berkembang pesat sampai mencapai taraf “go national dan go international” dan pada pihak lain tidak sedikit budaya yang seperti “hidup segan mati tak mau”. Pada waktu itu dirasakan berkembangnya semacam proses jayanisasi, seperti sangat terasa dalam kebahasaan berupa “membanjirnya” kata-kata Jawa memasuki perbendaharaan bahasa Indonesia. Dirasakannya dominasi kebudayaan Jawa dalam pembangunan Kebudayaan Indonesia dan pelaksanaan budaya politik Jawa dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan secara nasional.

Ada kaitannya dengan dampak di atas, sebagai dampak kedua dapat dikemukakan terjadinya pembangunan dan perkembangan kebudayaan sendiri-sendiri tanpa mengindahkan kepentingan pembangunan kebudayaan. Dengan mengatakan kehendak memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional dan kebudayaan nasional masing-masing kebudayaan daerah berupaya sekuat tenaga membangun dan mengembangkan dirinya. Perkembangan selanjutnya adalah ciri etnik semakin jelas dan semakin nyata serta disadari perbedaannya dengan etnik yang lain. Sebenarnya dapat dikatakan telah berlangsung suatu proses etnisasi pada tempat yang seyogyanya berlangsung nasionalisasi.

Dampak ketiga berupa timbulnya kecemburuan malah di beberapa kesempatan merupakan kecurigaan etnik. Sejumlah kebanggaan etnik dirasakan dengan sengaja dihilangkan. Seperti halnya dengan sejumlah pranata tradisional pemerintahan. Penerapan yang mengarah kepada peniadaan hak ulayat dengan alasan wawasan nusantara, penerapan kebijakan penetapan pemegang kepemimpinan pada struktur-struktur formal dan sebagainya.

Demikianlah dampak-dampak yang terlihat. Pada satu pihak terdapat upaya mengembangkan bermacam kebudayaan nasional yang sekaligus diharapkan berfungsi sebagai perekat bangsa. Namun kenyataannya upaya tersebut hanya berhasil sebagai yang dicita-citakan dan sebagai konsep yang pada hakekatnya cukup simpatik. Pada tingkat ‘akar rumput’ sebaliknya tumbuh macam kesadaran akan jati diri etnik, seperti halnya dapat diamati dengan munculnya definisi-definisi golongan etnik yang bertujuan memperjelas dan mempertajam siapa etnik yang bersangkutan itu. Siapa orang Batak itu, siapa Melayu itu dan siapa Bugis dan lain-lain.

3. Distribusi Penduduk

Selain politik budaya yang menimbulkan kompetisi tidak sehat antar budaya, kebijaksanaan dalam distribusi penduduk memberikan sumbangan bagi terjadinya benturan budaya. Dalam upaya mengatasi ketimpangan distribusi penduduk pemerintah menjalankan pemindahan penduduk dari daerah yang terlalu padat atau berkemampuan rendah ke daerah yang termasuk jarang penduduknya. Kebijaksanaan memindahkan penduduk tersebut telah bermula selagi pemerintahan penjajahan Belanda masih berkuasa. Namun pemindahan penduduk atau transmigrasi yang

dilakukan oleh pemerintah Indonesia jumlahnya jauh lebih besar dan melibatkan daerah yang lebih luas dan boleh dikatakan keseluruhan daerah.

Kebijakan kependudukan seperti itu sebenarnya baik dan dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik bagi daerah asal transmigrasi maupun daerah sebagai penerima. Kepadatan di daerah asal dapat dikurangi, sehingga ancaman involusi dapat dicegah. Kekurangan tenaga kerja bagi daerah penerima dapat diatasi, sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Semacam *mutual benefits* dapat diraih. Dan hal-hal seperti itulah yang dikatakan hendak diperoleh dengan transmigrasi penduduk.

Apakah yang dihasilkan oleh transmigrasi penduduk dilihat dari pertumbuhan kebudayaan? Teori difusi dan kaum disusionis melihat pertemuan atau kontak manusia akan menjadi saluran menyebar luaskan unsur budaya dari luar ke dalam kebudayaan suatu masyarakat. Pertemuan manusia akan menyebabkan terjadinya pertemuan budaya dan selanjutnya menimbulkan akulturasi. Demikian pula yang telah berlangsung dalam kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Pertemuan antara beragam budaya telah ikut memberikan “warna” kebudayaan, baik yang menyatakan dirinya dalam kehidupan nasional maupun dalam kebudayaan-kebudayaan daerah.

Mengikuti teori difusi seharusnya kontak penduduk yang terjadi sebagai konsekuensi logis dari transmigrasi ialah terjadinya proses-proses akulturasi yang bila berlangsung berkelanjutan dan dengan baik secara lambat laun atau secara evolusi akan semakin mengurangi “ketajaman” perbedaan budaya. Proses akulturasi di perkotaan, meskipun masih dapat diperdebatkan kiranya telah menunjukkan arah yang menggembirakan bila dilihat dari proses pengurangan “ketajaman” perbedaan budaya etnik.

Bagaimana halnya dengan kontak budaya antara transmigran dengan penduduk setempat? Kelihatannya kontak tidak berlangsung dengan baik. Pola pemukiman untuk para transmigran menempatkan mereka dalam *enclave*, dalam suatu posisi yang mendekati *solendid isolation*. Tepatlah sebutan *koloni* sebagaimana yang dikenakan bagi perkampungan transmigrasi di Lampung oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu atau pemukiman Yunani di Asia Barat di jaman sejarah kuno.

Selain kontak budaya yang tidak berlangsung dengan baik “pelayanan” kepada transmigran dapat menimbulkan tanda tanya bagi penduduk setempat dapat menimbulkan pula kesan perbedaan “kelas” sosial. Penyiapan daerah transmigrasi

sebelum ditempati meliputi penyiapan lahan yang luasnya rata-rata melebihi lahan milik penduduk setempat, tersedianya rumah tempat tinggal yang rata-rata kualitasnya lebih baik dan santunan sampai pertanian mereka menghasilkan adalah sebagian dari kemudahan yang diberikan kepada para transmigran yang dapat menimbulkan rasa superioritas pada satu pihak dan inferioritas pada pihak lain. Atau dapat menimbulkan apa yang sering disebut sebagai kecemburuan sosial.

4. Sentralisasi Wewenang dan Dampaknya

Berada dan hidup bersama sebagai suatu bangsa dalam satu Negara tentunya hidup dalam struktur yang sama. Bangsa Indonesia hidup bersama dalam satu Negara yang strukturnya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar (konstitusi) serta peraturan perundangan lainnya. Undang Undang Dasar dan peraturan lainnya menjadi rujukan dan tolak ukur dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Memang seharusnya demikian. Namun persoalannya adalah setiap unsure atau bagian bangsa yang disebut suku bangsa mempunyai tradisi sendiri, mempunyai budaya politik sendiri. Masing-masing mempunyai tradisi tentang wewenang dan kekuasaan, termasuk sumber dan jenisnya, mempunyai tradisi tentang kebiasaan, norma dan etika yang disebut dan terhimpun dalam adat yang melandasi dan mengatir aspek perilaku dan tindakan yang berkenaan dengan wewenang.

Tradisi yang secara menyeluruh dapat dimasukkan sebagai adaptasi itu telah hidup dan berkembang bersama dengan masyarakat suku bangsa pendukungnya. Dengan demikian sudah memakan waktu yang lama dan panjang, sehingga adaptasi dan pendukungnya itu tidak terpisahkan. Sebaliknya Undang Undang dan peraturan lainnya yang disusun untuk kehidupan berbangsa adalah norma baru yang belum tentu dipahami oleh masyarakat. Latar belakang atau filsafatnya belum tentu dihayati oleh masyarakat sebagaimana halnya mereka sangat menghayati filsafat di belakang adatnya.

Demikianlah, sebagai suatu contoh saja, dapat dilihat dari rintangan atau kesulitan melaksanakan proses pembentukan desa dan pemerintah desa menurut Undang Undang No. 5/ 1979. Penyusunan desa menurut Undang Undang tersebut mengandung banyak hal yang bertentangan dengan tradisi atau adaptasi suku bangsa setempat. Tidak hanya tradisi yang berkenaan dengan fisik wilayah, tetapi yang paling berat adalah

bertentangan dengan rasa bangga primordial yang selama ini melandasi pembagian wilayahnya, susunan struktur dan penentuan pimpinan yang bagi mereka sekaligus tokoh panutan, yaitu tokoh yang berwibawa dan mampu mengayomi.

5. Prasangka Rasial

Prasangka Rasial, khususnya terhadap keturunan Cina, menampakkan dirinya dalam konflik yang terjadi beberapa kali. Kerusuhan rasial tahun 1969 yang terjadi di sejumlah kota besar, seperti Bandung, Jakarta, dan Medan, kemudian beberap kali di Sol, demikian pula di beberapa kota lain selalu bersasaran keturunan Cina. Kenyataan seperti itu menimbulkan pertanyaan, karena penduduk Indonesia keturunan asing bukan hanya keturunan Cina.

Prasangka terhadap keturunan Cina berupa anggapan bahwa mereka cenderung untuk selalu “mengurung diri”, tertutup dan eksklusif, berorientasi kepada mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan segala kesempatan dengan segala cara, hanya mau berhubungan dengan kelompok sendiri dan lain sebagainya.

Keturunan Cina pada umumnya tinggal di perkotaan, di kota besar, menengah atau kecil. Sebagai penduduk kota tentunya lapangan kerja yang paling banyak dimasuki adalah bidang produksi dan jasa, terutama perdagangan dan perniagaan. Lapangan kerja utama sebagai sumber kehidupan itu menempatkan keturunan Cina pada suatu posisi yang menarik perhatian, karena mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan, termasuk kehidupan sehari-hari.

Posisi sedemikian kelihatannya merupakan produk sejarah yang panjang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang kemudian dipertajam dengan keluarnya peraturan perundang-undangan yang menempatkan keturunan Cina semakin mengelompok dan semakin “terpaksa” berkecimpung dalam bidang ekonomi. Demikian, misalnya, terdapatnya wilayah tempat tinggal khusus bagi keturunan Cina di perkotaan sebagai konsekuensi pembagian pemukiman di kota-kota kolonial yang sampai sekarang masih dapat ditemukan. Demikian pula halnya dengan semakin menjadi urbannya keturunan Cina sebagai salah satu dampak dari peraturan pemerintah No.18/1956.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Demikianlah konflik-konflik yang sudah terjadi atau yang masih berlanjut erat kaitannya dengan terjadinya benturan budaya yang disebabkan oleh pertemuan tidak berproses ke arah pembauran, tetapi cenderung mengisolasi. Demikian halnya, sehingga pada tingkat perkembangan tertentu menimbulkan konflik sosial

Dari uraian di atas konflik sosial yang sudah terjadi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga golongan. Kelompok pertama berupa konflik vertikal yang timbul oleh karena terjadi alienasi elite dan rakyat. Alienasi kemudian menimbulkan rasa permusuhan yang berwujud dalam konflik yang keras. Kelompok kedua yang terjadi oleh karena "isolasi budaya", sehingga proses difusi dan akulturasi tidak berlangsung. Akibatnya timbulnya kesalahpahaman, ketersingungan, perasaan diabaikan dan sebagainya sangat besar kemungkinannya. Kelompok ketiga adalah yang terjadi karena adanya prasangka sosial, khususnya prasangka rasial. Prasangka timbul oleh karena terjadinya isolasi sosial yang terencana yang kemudian dilihatnya berhasilnya golongan tertentu dalam mengumpulkan kekayaan dan dapat hidup lebih baik.

Dari pengelompokan konflik dalam ketiga golongan itu dapat dikemukakan bahwa pencegahan terjadinya konflik sosial dapat dilakukan dengan menghilangkan faktor penyebab timbulnya alienasi vertikal, timbulnya isolasi budaya melalui menghilangkan isolasi sosial akibat perencanaan distribusi penduduk yang dapat merintang berbaurnya masyarakat, penyiapan kemampuan dan peningkatan komunikasi antar etnik dan golongan sebagai upaya mencapai keharmonisan hidup bersama dan hilangnya prasangka rasial.

Bacaan

Koentjaraningrat (ed), 1999 (1997), **Manusia dan Kebudayaan di Indonesia**. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Mely G. Tan (ed), 1979, **Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia. Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa**. Jakarta : Penerbit Gramedia

Pelzer, Karl J. , 1985, **Toeang Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947**. Jakarta : Penerbit Sinar Harapan.

Reid, Anthony, 1979 **The Blood of the People. Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra**. Kuala Lumpur : Oxford University Press.

Staf Umum Tentara dan Teritorium I Bukit Barisan, 1956, **Memorandum tentang Peristiwa Pemberontakan DI-TII di Aceh**.

*) dipersiapkan untuk simposium Internasional Globalisasi dan Kebudayaan Likal 18-21 Juli 2001 di Padang

***) dosen Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Dalam realitas yang terjadi, konflik dapat menjadi sarana mempertegas integrasi dan memperkuat solidaritas sosial.

Sebagai catatan penutup, jika dilihat secara positif maka globalisasi bagi nagari memberikan peluang bagi nagari untuk kembali berperan aktif dalam percaturan kebudayaan, khususnya untuk ikut menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, yang selama hampir dua dasawarsa ini daya kreatif nagari dipasung dalam barak-barak sebuah rezim. Nagari punya doktrin yang jelas dan tegas secara konseptual yang siap diuji mengenai hak asasi manusia yang mengaku hak-hak individualitas seseorang, *'duak samo randah, taagk samo tinggi*, paham demokrasi, *lamak lauk bakunyah, lamak kato bapakatokan, bulek ala ka pembuluah, bulek kato ka mufakaik, kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, penghulu barajo ka nan bana, nana mana tagak sandiri*. Semangat mengurus diri sendiri, otonomi, kebersamaan, partisipatif dan paham egalitarianisme, yang sesungguhnya jauh mendahului dari konsep-konsep yang ditawarkan oleh Barat tentang nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya nagari yang dimaksud adalah nagari dengan semangat yang melekat dalam dirinya dan dimanage secara modern sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang ada. Artinya, nagari harus dipahami sebagai sebuah institusi yang memiliki ranah *'alam'* dan ranah *'rantau'*, domain adat dan agama yang akan selalu berdialektika terus-menerus untuk menghasilkan sintetik. Ini semua akan menjadi nyata ketika *iman-ilmu-amal* menjadi ideologi kultural sebagai keyword *'adat basanah syara'*, *'syara basanah kitabullah'* tempat bersemayam dan beroperasinya nagari dalam kehidupan anak nagari Minangkabau.

Padang, Juli 2001

Penulis

H. ZAINAL BAKAR